

ABSTRAK

Hindun Dias Syakhila. 2024. Implementasi Klaster Administrasi Pemerintahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi klaster administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dampaknya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Latar belakang penelitian ini adalah perubahan regulasi yang signifikan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, yang diatur dalam berbagai undang-undang sejak kemerdekaan hingga saat ini. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perubahan dalam klaster administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dan implementasi otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam hal perizinan industri dan pengelolaan sumber daya. Namun, implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan pembangunan antar daerah, praktik korupsi, dan legitimasi politik. Saran Penelitian ini penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.

Kata Kunci : Klaster Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja, Kewenangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Hindun Dias Syakhila. 2024. Implementation of the Government Administration Cluster in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law on Regional Government Authority. Thesis. Law Study Program. FH PGRI Madiun University. Supervisor. (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.

This research aims to analyze the implementation of the government administration cluster in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and its impact on regional government authority. The background to this research is significant regulatory changes in the regional autonomy system in Indonesia, which have been regulated in various laws since independence until now. The main focus of this research is how changes in government administration clusters regulated in the Job Creation Law affect regional government authority and the implementation of regional autonomy. This research uses a normative juridical approach with a qualitative descriptive analysis method. Data obtained from literature studies and analysis of related legal documents. The research results show that changes to regulations in Law Number 6 of 2023 have a significant impact on regional government authority, especially in terms of industrial licensing and resource management. However, the implementation of regional autonomy still faces various challenges, including development disparities between regions, corrupt practices, and political legitimacy. This research suggests strengthening the monitoring and accountability system at the regional level to prevent abuse of authority and corrupt practices.

Keywords : *Government Administration Cluster, Job Creation Law, Regional Government Authority*